

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 4 November 2022

**ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP DI SULAWESI BARAT PERIODE 2015-2020**

Ni Wayan Eni Santika, Syamsuddin HM, Santi Yunus
Universitas Tadulako

Email: enisantika@307.gmail.com, syamsuddin.iesp@gmail.com,
santishelo@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015- 2020. (2) Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020. (3) Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020. (2) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020.(3) Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah.

Abstract

This study aims: (1) To determine the effect of unemployment and government spending on poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period. (2) To determine the effect of unemployment on poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period. (3) To determine the effect of government spending on poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period. The data used in this study is secondary data obtained from the West Sulawesi Central Bureau of Statistics (BPS). This study uses the panel data regression analysis method. The results of the research analysis show that (1) Unemployment and government spending jointly affect poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period. (2) Unemployment has a positive and significant effect on poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period. (3) Government spending has a negative and significant effect on poverty in West Sulawesi for the 2015-2020 period.

Keywords: Poverty, Unemployment and Government Spending.

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu tahapan perubahan disegala bidang kehidupan, perubahan ini disebabkan rencana yang disusun oleh pemerintah yang digunakan untuk pembangunan dan masyarakat, dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban membawa pembangunan mengarah pada kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan (Amalia Dewi Rahmawati, 2015). Satu di antara tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pengentasan masalah kemiskinan.

Kemiskinan menjadi isu fenomenal yang tidak luput dari perhatian pemerintah karena menjadi acuan keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat menjadikan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pengukuran kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan berarti keadaan di mana seseorang dari segi ekonomi memiliki kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa kebutuhan makanan dan bukan makanan (sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan) yang pengukurannya dilihat dari segi pengeluaran.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan pada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal (Amalia, Duskri, & Ahmad, 2015). Sebagai provinsi termuda di Pulau Sulawesi yang dimekarkan pada 5 Oktober 2004 maka Sulawesi Barat menghadapi masalah yang relatif lebih berat dibandingkan daerah lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan (Gani & Amalia, 2015).

Menurut BPS Indonesia 2021 jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi cenderung berkurang, yakni pada Tahun 2016 sebanyak 2.113.160 jiwa, hingga pada Tahun 2021 penduduk miskin di Pulau Sulawesi sebanyak 2.006.790 jiwa. Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar disumbang oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang turun sebanyak 30,20 persen, kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara turun sebanyak 25,05 persen, Sulawesi Tengah turun sebanyak 21,79 persen, Gorontalo turun sebanyak 18,17 persen, Sulawesi Utara turun sebanyak 10,48 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menyumbang penurunan jumlah penduduk miskin terendah, yaitu sebesar 0,71 persen.

Tentunya terdapat banyak dampak yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah satu di antaranya adalah disebabkan oleh pengangguran, pengangguran adalah sekelompok orang yang telah menginjak usia kerja (15 tahun ke atas) namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dilihat dari segi ekonomi pengangguran berdampak pada daya saing dan daya beli masyarakat sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan masyarakat, nutrisi dan pengeluaran rata-rata penduduk (Gustini Rahmawati, 2015). Pemerintah Sulawesi Barat tentunya menyadari dampak masalah yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kemiskinan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut pemerintah Sulawesi Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat dan tercapainya kesejahteraan umum mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, telekomunikasi dan pariwisata. Namun, hal itu masih belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan secara baik.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS Sulawesi Barat diketahui tingkat kemiskinan Sulawesi Barat menunjukkan angka yang berfluktuatif, namun terjadi peningkatan tajam dari Tahun 2015 hingga Tahun 2020 yaitu dari 153.210 jiwa sampai 159.050 jiwa atau meningkat sebanyak 5,84 persen. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesempatan kerja, rendahnya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Jumlah penduduk merupakan satu di antara akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, sementara dampak yang terjadi akibat tingginya jumlah penduduk yaitu terciptanya angkatan kerja. Kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan

yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pengangguran (Wardani & Januarti, 2013). Sulawesi Barat sering dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat sempitnya lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Penumpukan angkatan kerja tentu memberikan beban bagi perekonomian apabila tidak diimbangi dengan perluasan atau penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Tingginya jumlah pengangguran tentu akan mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya akan mengurangi konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan (Afandi, Chamalah, Wardani, & Gunarto, 2013).

Pemerintah selalu berupaya agar pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui peran ini pemerintah menjaga rakyat agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran (Sumiyarti, 2022). Menurut Noor (2015) aktivitas ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan publik di masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dari peningkatan aktivitas ekonomi akan memberikan dampak pada pendapatan, mengurangi pengangguran dan penurunan kemiskinan (Peng, Lu, & Webster, 2022).

Satu di antara upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal, kebijakan fiskal dalam konteks makro diartikan sebagai kebijakan yang terkait dengan pajak dan anggaran pemerintah (Farrugia et al., 2018). Pengolahan belanja daerah yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung merupakan hal penting perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dapat memotong perangkap setan kemiskinan melalui perannya dalam belanja. Berdasarkan bidang tujuannya, belanja pemerintah dapat dikelompokkan kedalam jenis belanja ekonomi yang meliputi belanja sektor produktif dan infrastruktur. Satu di antara belanja langsung adalah belanja modal, kategori belanja modal meliputi belanja untuk modal tanah, gedung, mesin, jalan, irigasi, jaringan dan sebagainya (Sumiyarti, 2022). Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat Periode 2015-2020?

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan diantaranya uji chow, uji hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji chow memberikan hasil p-value $0,0000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga memberikan kesimpulan bahwa fixed effect model lebih baik dari pada common effect model. Uji hausman menunjukkan p Value $0,2194 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga model random effect model lebih baik dari pada fixed effect model. Selanjutnya, melalui uji LM didapat $0,0000 < \alpha 0,05$ hal ini berarti bahwa uji LM memberi keputusan H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga kesimpulannya bahwa random effect model lebih baik dari pada common effect model. Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan dengan uji chow, uji hausman dan uji LM maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) untuk melihat pengaruh pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Oleh karena terpilihnya random effect model, berikut ini persamaan hasil estimasi random effect model:

$$\text{LnK}_{it} = \alpha + \beta \text{LnPG}_{it} + \beta \text{LnPP}_{it} + e \quad \text{LnK}_{it} = 3,357215 + 0,025129 - 0,009913$$

Artinya apabila variabel pengangguran naik sebesar 1 persen maka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,025129 persen. Artinya apabila variabel belanja modal naik sebesar 1 rupiah maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,009913 persen.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4.1

Hasil Uji F

| <i>F-statistic</i> | <i>Prob(F-statistic)</i> |
|--------------------|--------------------------|
| 4,448856 | 0,017127 |

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis uji-F statistik menunjukkan bahwa p-Value sebesar $0,017127 < \alpha 0,05$ yang berarti variabel pengangguran dan belanja modal secara bersama-sama memengaruhi variabel kemiskinan.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.2 Hasil Uji-t

| <i>Variabel</i> | <i>Coefficient</i> | <i>lapangan Std. Error</i> | <i>pekerjaan baru t-Statistic</i> | <i>tidak da Prob.</i> |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| K | 3,357215 | 0,326227 | 10,29105 | 0,0000 |
| PG | 0,025129 | 0,012450 | 2,018393 | 0,0494 |
| PP | -0,009913 | 0,003897 | -2,543734 | 0,0144 |

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil uji-t statistik variabel pengangguran memiliki probabilitas sebesar $0,0494 < 0,05$ yang artinya variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan koefisien regresi sebesar 0,025129. Variabel belanja modal memiliki probabilitas sebesar $0,0144 < 0,05$ yang artinya variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan koefisien regresi sebesar 0,009913.

Pembahasan

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi data panel melalui uji-t statistik menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,025129 berhubungan positif terhadap kemiskinan, nilai probabilitas sebesar $0,0494 < 0,05$ yang menandakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Terdapat hubungan positif antara pengangguran terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa satu di antara faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat adalah pengangguran yang tinggi.

Ketidaktersediannya lapangan pekerjaan dan rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat menjadi rendah.

Berdasarkan hasil analisis BPS Sulawesi Barat 2021 bahwa angkatan kerja Sulawesi Barat sebanyak 696.119 penduduk dari jumlah tersebut 672.986 adalah penduduk yang bekerja sedangkan sisanya adalah pengangguran. Mereka yang berstatus pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah punya pekerjaan namun belum mulai pekerjaannya. Sementara dari total pengangguran yang ada, sebanyak 10.622 diantaranya belum pernah bekerja dan 12.510 sudah pernah bekerja.

Masyarakat yang berada dalam kondisi tidak bekerja tentunya memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga membuat masyarakat menjauh dari kesejahteraan. Sebab satu di antara faktor masyarakat dikategorikan sejahtera adalah saat masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar. Pendapatan masyarakat mencapai tingkat maksimum apabila penggunaan tenaga kerja secara penuh dapat terwujudkan apabila tidak mencapai tingkat maksimum maka akan menciptakan pengangguran dan akan memberi dampak pada pendapatan yang akan diterima masyarakat (Waruwu & Nasution, 2018).

Sebagian besar penduduk di Sulawesi Barat bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM atau kualitas diri masyarakat untuk dapat berpartisipasi di sektor non pertanian. Sebanyak 50,19 persen penduduk berusia 15 tahun keatas bekerja selama seminggu terakhir bekerja pada sektor tersebut.

Jumlah pengangguran paling banyak berasal dari pekerja dengan tingkat Pendidikan SMA dan SMK atau Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung fluktuatif tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan masyarakat Sulawesi Barat yang justru meningkat. Kondisi tersebut berkorelasi dengan sebaran sektor yang menyerap tenaga kerja yang ada di Sulawesi Barat serta berkaitan pula dengan tingkat Pendidikan para tenaga kerja yang mengisi sektor-sektor lapangan pekerjaan. Tahun 2018 tercatat sebanyak 323.300 masyarakat Sulawesi Barat yang bekerja di sektor pertanian jumlah tersebut lebih dari sepuluh kali angka total pekerja di Wilayah Sulawesi Barat. Walaupun demikian, terdapat fenomena yang menjadi kendala terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dan korelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Situasi yang dimaksud adalah banyaknya pekerja yang tergolong sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar/diupah, dan jika dibayar upah yang diterima masih tergolong rendah.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja Sulawesi Barat didominasi oleh pekerja dengan tingkat Pendidikan SMA ke bawah, yakni sebesar 53 persen, hal ini diduga menjadi satu di antara penyebab kenapa penurunan TPT tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat. Tingkat Pendidikan yang rendah, daya tawar para pekerja di pasar tenaga kerja juga rendah sehingga berdampak pada daya beli yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga.

dengan kata lain di pasar tenaga kerja di Sulawesi Barat, terdapat penawaran tenaga kerja yang berpendidikan SMA dan SMK yang justru tidak terserap. Pendidikan vokasi yang menjadi satu di antara concern pemerintah Sulawesi Barat perlu didukung dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para alumninya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil hipotesis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sakuhuni et al., 2011 mengatakan bahwa meskipun banyak orang yang bekerja di sektor informal, itu tidak produktif. Sementara hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dilakukan oleh Putri 2019, Prayoga 2019, Wardani 2013, Waruwu 2016 dan Irhamni, 2017. Namun, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu

yaitu Nugroho, 2019 hasil hipotesis penelitiannya menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, melalui hasil uji-t statistik variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,009913 menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, nilai probabilitas variabel pengeluaran pemerintah pada penelitian sebesar 0,0144 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha (α) = 0,05 yang menandakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan.

Adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Barat membawa dampak terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi barat. Artinya apabila pengeluaran pemerintah di Sulawesi Barat semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut menjadi faktor yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat.

Kebijakan APBD Kabupaten/Kota sebagai bentuk aktualisasi fungsi pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan pro-rakyat dalam bentuk penyediaan public services yang dibutuhkan masyarakat. Tiga aspek kebijakan APBD ini, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, ketiganya memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada sisi penerimaan daerah harus menekan distorsi ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijakan belanja harus bisa memberikan efek multiplier ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan perannya menjalankan fungsi alokatif dan distributif untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Belanja modal sebagai investasi sektor publik dianggap sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi infrastruktur, fasilitas penghubung, pertanian, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui program padat karya, secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan.

Ketersediaan sejumlah infrastruktur ekonomi akan mendorong perkembangan investasi swasta sehingga membuka lapangan pekerjaan yang baru pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (WAHYUDDIN & AKHMADIANSYAH, 2022).

Skala regional Pulau Sulawesi, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat berada pada level menengah, yakni urutan ketiga terendah setelah Sulawesi Utara sebesar 7,59 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 8,87 persen. Akan tetapi, jika ditinjau dari progres pengentasan kemiskinan maka Sulawesi Barat menempati posisi terakhir. Sulawesi Barat mencatat kinerja negatif dengan kenaikan tingkat kemiskinan ditengah kinerja positif provinsi lain di Kawasan Pulau Sulawesi

Kemudian dari sisi perbandingan antar kabupaten menunjukkan Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat kemiskinan 16,06 persen angka tertinggi dengan capaian IPM paling rendah. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa satu di antara strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperluas akses Pendidikan. Hal ini mengisyaratkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali aktivitas program penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan komoditas yang berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan adalah beras dan rokok merupakan dua kontributor terbesar terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Alternatif yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggalakkan Program Keluarga Harapan (PHK) diakui dalam jangka pendek program PHK tidak terlalu berdampak, Akan tetapi, program tersebut merupakan upaya pemutus rantai kemiskinan dengan menyorot aspek kesehatan dan pendidikan warga miskin. Oleh karena itu, selain dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan program PHK dimaksudkan juga untuk mendorong capaian IPM Sulawesi Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu, Rahmawati 2018, Heriqbaldi 2014, Deviana & Abdullah 2018, Putrayuda et al., 2017, dan Mukarramah 2020 yang memperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2020.
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015- 2020.

BIBLIOGRAFI

- Afandi, Muhamad, Chamalah, Evi, Wardani, Oktarina Puspita, & Gunarto, H. (2013). Model dan metode pembelajaran. *Semarang: Unissula*.
- Amalia, Yuli, Duskri, Muhamad, & Ahmad, Anizar. (2015). Penerapan model eliciting activities untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self confidence siswa SMA. *Jurnal Didaktik Matematika*, 2(2).
- Farrugia, Lynn A., Rhyee, Sean H., Campleman, Sharan L., Judge, Bryan, Kao, Louise, Pizon, Anthony, Porter, Lauren, Riederer, Anne M., Wiegand, Timothy, & Calello, Diane. (2018). The toxicology investigators consortium case registry—the 2017 annual report. *Journal of Medical Toxicology*, 14(3), 182–211.
- Gani, Irwan, & Amalia, Siti. (2015). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Penerbit Andi.
- Peng, Ziyu, Lu, Weisheng, & Webster, Chris. (2022). If invisible carbon waste can be traded, why not visible construction waste? Establishing the construction waste trading ‘missing market.’ *Resources, Conservation and Recycling*, 187, 106607.
- Rahmawati, Amalia Dewi. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 23(2).
- Rahmawati, Gustini. (2015). Buku teks pelajaran sebagai sumber belajar siswa di perpustakaan sekolah di SMAN 3 Bandung. *EduLib*, 5(1).
- Sumiyarti, Sumiyarti. (2022). Improving the Performance of Librarians and Teachers in Managing Libraries as Learning Resources Through Structured Guidance at SD Negeri Sulusur Kapanewon Samigaluh Academic Year 2021/2022. *International Journal of Chemistry Education Research*, 142–149.
- WAHYUDDIN, WAHYUDDIN, & AKHMADIANSYAH, AKHMADIANSYAH. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN

JARINGAN GAS RUMAH TANGGA DI DESA GAS ALAM KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *I-CON MEDIA*, 5(1), 1–10.

Wardani, Nurul Kusuma, & Januarti, Indira. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 117–131.

Waruwu, Tomoyud, & Nasution, Suhendri. (2018). Pengembangan Keamanan Web Login Portal Dosen Menggunakan Unified Modelling Language (UML). *Jurnal Mahajana Informasi*, 3(1), 34–40.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.